

# PERAN USAHA KECIL DAN MENENGAH ( UKM ) DALAM PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA BARU

**Moh. Munir**

**Abstrak:** Memasuki tahun 2006 sebagai era pemulihan struktur kehidupan ekonomi setelah selama 5 tahun lebih dilanda krisis ekonomi dan krisis multidimensional. Karena seharusnya Indonesia sudah pulih kehidupan ekonominya seperti Negara-negara lain di Asia yang juga dilanda krisis dalam waktu yang bersamaan. Namun kenyataan tidak seindah yang dibayangkan, krisis ekonomi belum sirna dari hadapan kita, belum sempat kita berbicara masalah pemulihan kehidupan ekonomi, kita ditimpa masalah yang hamper sama beratnya yaitu kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM membuat pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 6%. Kondisi ini menyebabkan pengangguran bertambah banyak. Dalam kondisi ekonomi yang serba sulit ini tampaknya sektor UKM terbukti paling handal dilanda krisis disbanding dengan perusahaan besar yang lain. Dan tampaknya sektor UKM punya kontribusi yang paling besar pada pembentukan PDB yang makin besar. Selain itu sektor UKM terbukti dari tahun ketahun secara parsial mampu menyerap dan membuka lapangan kerja baru dari berbagai bidang mulai bidang ekonomi, pertanian, peternakan, kerajinan, industri dsb. Sehingga pertumbuhan dan pemberdayaan sektor UKM menjadi suatu keharusan dalam rangka penciptaan lapangan kerja baru, baik disektor formal maupun sektor informal.

**Kata kunci:** Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan lapangan kerja

## PENDAHULUAN

Memasuki era tahun 2006 sebagai era tahun pemulihan struktur kehidupan ekonomi setelah 7 tahun dilanda krisis ekonomi dan berlanjut pada krisis multidimensional pada tahun 1998. Tampaknya kenyataan perbaikan kehidupan ekonomi nasional yang diharapkan mampu merubah dimensi kehidupan menjadi lebih makmur seperti negara Asia yang lain yang juga dilanda krisis yang sama, ternyata masih jauh dari harapan. Krisis ekonomi masih terasa dampaknya ditambah dengan kenaikan harga BBM akibat era globalisasi akan membawa kesengsaraan kehidupan ekonomi fase kedua. Pertumbuhan ekonomi diasumsikan tumbuh sebesar 7 %, tapi hanya mampu tumbuh sekitar 6 %. Kenyataan pil pahit ini harus kita telan entah sampai kapan. (Jawa Pos, Desember,2005).

Kondisi perekonomian dengan pertumbuhan sebesar 6 %, mengindikasikan lemahnya daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat yang lemah berakibat lesunya pasar. Pasar yang kurang bergairah berakibat permintaan barang dan jasa menjadi turun. Turunnya permintaan hasil produk menyebabkan kerugian bagi para pengusaha. Akumulasi kerugian menyebabkan perusahaan sulit berkembang dan bahkan berakhr dengan tindakan rasionalisasi. Kondisi yang demikian sering kita alami sejak terjadinya krisis ekonomi sampai sekarang. Jangankan merekrut karyawan baru tidak terjadi PHK itu sudah bagus. Hal ini berpengaruh langsung pada pasar ketenagakerjaan kita.

---

*Moh Munir adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang*

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sudah menjadi masalah klasik, terutama dinegara yang sedang berkembang. Jauh-jauh hari sebelum krisis lapangan pekerjaan berkembang menurut deret hitung, sedangkan jumlah pencari kerja berkembang menurut deret ukur. Lebih-lebih lagi setelah terjadi krisis ekonomi th 1998, ditambah dengan kenaikan harga BBM yang akan menambah biaya operasional dan biaya modal ( Jawa Pos, Nopember, 2005), maka lapangan pekerjaan akan semakin sulit dan sedikit. Perusahaan-perusahaan besar yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, ternyata malah sebaliknya disana-sini sering terjadi PHK. Justru banyak fakta membuktikan bahwa sektor usaha skala kecil, mikro dan menengah meskipun dilanda krisis ekonomi, bahkan ada kenaikan harga BBM sekalipun sektor ini masih eksis dan bertahan. ( Jawa Pos, Januari, 2004)

Dari berbagai uraian diatas tampaknya perlu dikaji lebih mendalam dan dicermati, bagaimana peran Usaha Kecil dan Menengah ( UKM ) dalam menyerap tenaga kerja baru sebagai upaya menuju kemandirian dibidang ekonomi.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Profil Usaha Kecil dan Menengah ( UKM ) di Indonesia.**

UKM adalah salah satu jenis usaha milik perorangan, badan usahanya tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum. Badan usaha ini selain berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil, usaha menengah atau usaha besar.

Dilihat dari besarnya tenaga kerja Usaha Kecil memiliki jumlah tenaga kerja lebih besar dari 5 orang sampai dengan paling banyak 20 orang. Memiliki omzet paling sedikit 200.000.000 pertahun. Sedangkan kriteria usaha menengah bila memiliki tenaga kerja lebih besar dari 20 orang samapai dengan 100 orang.

Dari jumlah UKM di Indonesia cukup banyak jumlahnya sekitar 99,9 % dari jumlah seluruh perusahaan di Indonesia. UKM mampu menampung 99 % angkatan kerja yang ada. Dalam pembentukan Domestik Bruto (PDB) andil UKM hanya sebesar 59 %, dan usaha besar memberikan andil sebesar 41 % terhadap PDB. Hal membuktikan bahwa sebagian besar tenaga kerja kita gajinya masih rendah dan banyak berkerja yang tidak sesuai dengan pendidikannya, akibat banyaknya pencari kerja, sehingga banyak yang bekerja apa adanya.

Pengalaman membuktikan bahwa ketika terjadi krisis ekonomi menimpa kita di akhir tahun 1997 yang diikuti dengan resesi yang mendalam UKM sangat tahan banting. ( Kompas, Nopember, 2003). Resesi kita hanya berlangsung satu tahun saja, yaitu tahun 1998 yang PDBnya sempat turun. Namun ditahun 1999 PDB sudah mulai meningkat sebesar 0,8 %. Dalam pereode ini perusahaan-perusahaan besar tidak berfungsi sebagai lokomotif perusahaan, karena sebagian besar sedang bermasalah dan ditangani oleh BPPN. Investor asing enggan masuk, karena Indonesia dianggap terlalu beresiko tinggi. Dalam hal ini hanya sektor UKM yang mampu mendorong angka pertumbuhan ekonomi.

UKM tidak ada hubungannya dengan aliran masuknya modal asing dan seolah-olah berada diluar ekonomi formal yang besar folumnya. UKM mempunyai kehidupan ekonomi yang kekuatannya mandiri. UKM yang selama ini dianak tirikan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga keuangan ekonmi ternyata memberikan sumbangan yang begitu besar pada penyerapan tenaga kerja dan memberikan kekebalan dalam krisis. (Kwik Kian Gie, 2003) Ini berarti bahwa UKM tidak hanya dalam arti ekonomis memberikan pendapatan dan lapangan kerja pada bagian termiskin dari rakyat kita, tetapi juga memberikan keamanan dan perisai terhadap gejolak sosial. Bisa dibayangkan bila tidak ada UKM yang menampung demikian banyaknya tenaga kerja, mereka akan melakukan perampokan dan penjarahan besar-besaran. Tidak berlebihan bila akan terjadi refolusi sosial. Sektor UKM telah memberikan ketenangan dan ketentraman kepada para pengusaha besar.

Bukan hanya itu para pengusaha besar sekarang telah terbukti melakukan penjarahan besar-besaran terhadap uang masyarakat yang dipercayakan kepada bank-bank milik mereka. Uang masyarakat yang dipercayakan kepada bank-bank itu dijarah melalui teknik rekayasa keuangan yang rumit. Maka dalam kepanikan terhadap kemarahan para nasabah bank, pemerintah turun tangan dengan memberikan bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan jumlah sekitar Rp. 140 trilyun.

Secara umum UKM bukan dalam pengertian yang statis yang berarti bahwa sekali usahanya kecil, tetap akan kecil. UKM mengandung usaha yang sangat beragam, baik ditinjau dari sudut skala usahanya, skala usaha ini sangat dinamis dan berpeluang menjadi skala yang besar.

### **Kedudukan UKM Dalam Perekonomian Nasional**

Menurut Sutrisno (2003) kedudukan UKM dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari : (1) kedudukannya sebagai pelaku utama dalam kegiatan ekonomi diberbagai sektor, (2) penyedia lapangan kerja baru, (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Melihat begitu pentingnya sektor UKM tidak dapat dipungkiri pada saatnya nanti sektor ini dapat menjadi penyangga ekonomi nasional.

Pada paragraf pertama dekade 1970 an, persoalan kesenjangan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan kesenjangan usaha besar dan kecil telah menjadi perdebatan sengit dan berkelanjutan. Ketika itu pemerintah yakin betul bahwa pemerataan lambat laun akan terwujud dengan sendirinya, kalau ekonomi nasional makin membesar. Dalam perkembangan selanjutnya kenyataan itu hanya tinggal harapan bagi sebuah fatamorgana. UKM semakin jauh tertinggal dengan usaha besar milik para konglomerat, mereka menguasai seluruh sektor kegiatan ekonomi dari hulu sampai hilir.

Pertambahan ekonomi saat ini mengalami perkembangan yang sangat spektakuler dan mendapat julukan sebagai macan asia. Kalau dilihat secara mendalam pertumbuhan yang tinggi itu hanyalah pertumbuhan yang semu dan sangat tidak profesional. Para pengusaha besar dapat berkembang hanya karena dekat penguasa waktu itu. Semua itu mencapai klimaks setelah badai krisis ekonomi, dimana para konglomerat berguguran bersamaan dengan lengsernya pemerintahan orde baru.

### **Peran Usaha Kecil Dan Menengah ( UKM )**

#### **Pengakuan Peran UKM**

Sejalan dengan pemikiran tentang permasalahan yang menyangkut tentang UKM bisa ditempatkan di dalam kerangka utuh bagi terwujudnya suatu pembaharuan ekonomi yang mendasar maka diperlukan suatu landasan pijak yang kokoh dan kerangka pemikiran yang komprehensif yang memayunginya. Selama pemerintahan orde baru pengakuan sektor UKM hanya terhenti pada tatatanan konseptual, sedang dalam realisasinya sektor UKM mengganti peran usaha besar menjadi dikesampingkan.

Upaya pemberdayaan ekonomi rakyat pada prinsipnya merupakan manifestasi dari tuntutan pembangunan ekonomi yang berlandaskan kepada nilai-nilai demokrasi yang universal, yaitu menjadikan manusia sebagai objek pembangunan dengan otonomi sebagai titik tolaknya (Fasisal, 2002). Berbagai potensi yang dimiliki sektor UKM harus dioptimalkan, pembangunan bukan menjadikan kota sebagai pusat pertumbuhan dengan sosok modernisasi yang menyilaukan.

Mengacu pada konsep pengakuan peran sektor UKM, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus terwujud dalam dua sisi, yaitu pertama perluasan basis aktor-aktor ekonomi dalam proses produksi, kedua penegakan kedaulatan konsumen. Dengan demikian baik dari sisi produsen maupun konsumen harus sama-sama diberdayakan.

Kenyataan membuktikan sektor UKM sangat beraneka ragam, baik dari segi kegiatan maupun lingkungan usaha yang dihadapinya. Oleh karena itu karakteristik dan permasalahan yang dihadapi UKM berbeda dari satu jenis kegiatan ke jenis kegiatan

yang lainnya, dan satu lokasi ke lokasi lainnya. Realita inilah yang menyebabkan tidak dimungkinkannya dibuat suatu kebijakan nasional baik pemberdayaan UKM yang dirancang secara sentralis dan terinci sampai tingkat operasional.

Di tingkat nasional dibutuhkan dalam sebuah komitmen politik dan dukungan bidang-bidang, baik langsung maupun tidak langsung, memperkokohkan bagi tumbuh dan berkembangnya sektor UKM. Menurut Fasisal komitmen politik dari eksekutif dan parlemen paling tidak mencakup tiga hal, yaitu : pertama keterpihaan yang dilandasi prinsip-prinsip pemberdayaan usaha kecil yang sangat sehat lewat penguatan daya saing dan arah pengembangan UKM.

Kedua alokasi dana APBN / APBD yang cukup memadai untuk UKM sebagai cerminan dari politik anggaran. Ketiga pembuatan peraturan perundang-undangan yang memberikan ruang gerak seluas luasnya disatu pihak dan menghilangkan hambatan-hambatan yang dihadapi UKM.

### **Perkembangan Usaha Kecil Menengah ( UKM )**

Selama ini perkembangan sektor UKM di Indonesia mendapat perhatian serius baik dari kalangan pemerintah maupun kalangan swasta, karena kelompok unit usaha tersebut menyumbang sangat besar kepada terciptanya kesempatan kerja. Di masa krisis ekonomi berlangsung sektor UKM lebih mampu bertahan dibanding dengan usaha skala besar.

Selama periode tahun 1997-2001 jumlah usaha dari semua skala mengalami peningkatan secara parsial. Gambaran lebih kongkrit tentang perkembangan jumlah usaha kecil dan menengah ( UKM ), dapat terlihat dalam tabel berikut : Tabel 1

**Tabel 1 Jumlah Usaha kecil, Menengah dan Besar tahun 1997-2001**

Variabel 1997	1998	1999	2000	2001	
UK	39.704.661	36.761.689	37.859.509	39.121.350	40.137.77
UM	60.449	51.889	52.214	55.437	57.473
UB	2.097	1.831	1.885	2.005	2.095
TOTAL	39.767.207	36.815.409	37.913.608	39.178.782	40.197.661

Sumber Tulus, T, 2003

Berdasar tabel 1 ternyata jumlah Usaha Kecil menunjukkan jumlah yang sangat besar, sehingga dapat dikatakan usaha ini merupakan kunci pengaman masalah ketenagakerjaan di Indonesia.

Jumlah unit UKM bervariasi menurut sektor ekonomi dan terutama usaha kecil terkonsentrasi di pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan. Secara lebih kongkrit jumlah unit usaha dan tenaga kerja di Industri Kecil ( IK ) dan Industri Rumah Tangga ( IKRT ) pada periode 1999 sampai 2001 dapat dilihat dalam tabel 2.

**Tabel 2 Jumlah Unit dan Tenaga Kerja di Industri Kecil ( IK ) dan Industri Kecil Rumah Tangga ( IKRT) tahun 1999-2001**

Kode Industri	Pereode	Jumlah Unit	Jumlah Pekerja
		UK dan UKRT	UK dan UKRT
Industri makanan Dan minuman	1999	52.524	402.558
	2000	67.253	421.586
	2001	63.631	480.643
Indstri Tekstil Pakain Jadi dan Kulit	1999	30.071	261.643
	2000	39.122	332.059
	2001	49.238	386.719
Industri Kayu dan Perabot Keluarga	1999	50.472	13.437
	2000	50.258	20.482
	2001	56.658	25.118
Industri Kimia Minyak Bumi Karet & Plastik	1999	2.535	22.009
	2000	1.557	23.222
	2001	3.038	39.741
Indstri Logam Mulai	1999	96	942
	2000	772	5.896
	2001	397	4.611

Sumber Tulus, T. 2003

Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa jumlah dan jenis usaha sangat bervariasi, demikian juga dengan jumlah tenaga kerja yang dapat diserap. Data tersebut juga menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, dengan demikian sektor UKM mempunyai posisi yang sangat strategis bagi pembangunan ekonomi bangsa di era reformasi.

Peran sektor UKM di Indonesia dalam bentuk kontribusi out put terhadap pembentukan atau pertumbuhan Produk Domestik Bruto ( PDB) cukup besar walaupun tidak sebesar kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja ( Tulus, T,2003). Kegiatan yang dilaksanakan oleh sektor UKM biasanya bersifat padat karya (banyak menyerap tenaga kerja).

## **PEMBAHASAN**

### **Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah ( UKM )**

Upaya pemberdayaan sektor UKM dimaksudkan untuk meningkatkan harkat dan martabat UKM, sehingga UKM lebih mampu berperan dalam pencatatan ekonomi nasional. Seringkali upaya pemberdayaan terperangkap dalam bias-bias pemberdayaan. Hal ini perlu dilakukan agar para pakar dan praktisi yang belum memahami dan mungkin tidak meyakini menjadi dasar terhadap hakikat pembangunan.

Menurut Kartasasmita (1996) pemberdayaan UKM merupakan alternatif pemecahan terhadap berbagai dilema yang dihadapi sektor UKM. Adapun berbagai bias yang mungkin terjadi dalam pemberdayaan yaitu :

Bias pertama, bahwa pemberdayaan UKM lebih mementingkan bantuan material ( modal ) daripada ketrampilan teknis atau manajerial. Pola dan anggapan

semacam ini sering mengakibatkan upaya pemberdayaan itu sebagai pemborosan sumberdaya dan dana, karena kurang memperhatikan aspek teknis dan manajerial.

Bias kedua, anggapan bahwa program pemberdayaan UKM adalah program dari atas (pemerintah), dan mereka yang diberdayakan kurang menjadi titik sentral pelaksanaan. Kerjasama yang baik antara pemerintah dan sektor UKM dalam proses pemberdayaan sangat diperlukan, dengan demikian program pemberdayaan tidak bertepuk sebelah tangan. Dalam kaitan dengan bias yang kedua sering kali proyek pemberdayaan UKM habis, maka habislah program pemberdayaan.

Bias ketiga, sektor UKM dianggap tidak tahu apa yang diperlukan atau bagaimana memperbaiki nasibnya. Oleh karena itu, mereka harus dituntun dan dibimbing dan tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan meskipun yang menyangkut dirinya sendiri. Akibat dari anggapan semacam itu menjadikan proyek-proyek pemberdayaan UKM menjadi salah alamat. Dan mereka yang diberdayakan menjadi tetap tidak berdaya.

Dalam jangka panjang program pemberdayaan UKM harus mampu mentransfer model pengusaha piramida menjadi model pengusaha belah ketupat. Dari model ini semula profil pengusaha kita mayoritas adalah usaha kecil ( lapisan bawah ), yang jumlahnya sangat besar. Sedangkan sebagian kecil adalah pengusaha besar yang menguasai sebagian modal usaha. Kondisi yang demikian akan sangat mengganggu pembangunan ekonomi bangsa dimasa yang akan datang.

Dimasa yang akan datang profil pengusaha Indonesia harus diubah menjadi belah ketupat, dimana mayoritas pengusaha adalah lapisan menengah. Kondisi semacam ini akan dapat mengurangi terjadinya kesenjangan antara kaya dan miskin.

Adapun determinan pengubah menyangkut persoalan penyempurnaan dalam sistem ( pola ) industrialisasi, pendidikan, pengembangan masyarakat dan juga pengembangan korporasi. Semuanya itu akan dapat dijalankan apabila dilandasi oleh semangat idealisme yang mencerminkan kebersamaan kita sebagai bangsa. Pembangunan ekonomi pada hakekatnya untuk kemakmuran seluruh bangsa, yaitu bangsa Indonesia.

Apabila profil model pengusaha belah ketupat dapat dicapai, itu maknanya sektor UKM akan benar-benar menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Amanat konstitusi ( UUD 1945 ) akan terealisasi dalam kenyataan dan semuanya itu akan dapat mendukung proses keutuhan negara dan sekaligus menjamin terjadinya stabilitas ekonomi nasional.

Semangat idealisme harus menjadi dasar setiap kebijakan yang dapat mempengaruhi bekerjanya determinan pengubah. Idealisme dapat dipandang sebagai sebuah komitmen yang wajib dilaksanakan dan bukan sebuah retorika. Komitmen ini penting khususnya bagi pemimpin atau para pengambil keputusan, karena dengan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki dapat mempengaruhi determinan pengubah.

Industrialisasi yang dilakukan harus mencerminkan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, sehingga produk yang dihasilkan mempunyai daya saing yang tinggi, baik dalam pasar domestik maupun dalam pasar global. Pendidikan dalam arti luas menjadi jalur yang penting dalam mengupayakan transformasi itu.

Pengembangan masyarakat di sini mengandung makna sikap masyarakat kewirausahaan. Jiwa dan semangat wirausaha harus ditanamkan dalam masyarakat. Ini semua dimaksudkan untuk membangun masyarakat sektor UKM.

### **Peran UKM Sebagai Penyedia Lapangan Kerja Baru**

Salah satu strategi pemberdayaan sektor UKM dimaksudkan untuk meningkatkan harkat dan martabat, sehingga UKM lebih mampu berperan dalam penciptaan ekonomi nasional. Langkah awal dilakukan dengan mengubah profil pengusaha Indonesia. Dimana sebelumnya pengusaha kecil ( lapisan bawah ) menempati porsi paling bawah yang jumlahnya sangat besar. Sedangkan sebagian kecil adalah pengusaha besar yang menguasai sebagian modal usaha. Hal ini bila diteruskan akan sangat mengganggu pembangunan ekonomi bangsa.

Dimasa yang akan datang profil pengusaha Indonesia harus diubah, dimana mayoritas pengusaha adalah lapisan menengah. Kondisi ini akan mengurangi terjadinya kesenjangan antara kaya dan miskin. Selain hal ini, maka dampak jangka panjangnya akan dapat menyerap tenaga kerja baru.

Dari sisi lain peran sektor UKM di Indonesia dalam bentuk kontribusi output terhadap pembentukan atau pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) cukup besar, dan hal ini tentunya akan diikuti dengan kontribusi penciptaan lapangan kerja baru (Tulus, T, 2003). Karena biasanya sektor UKM bersifat padat karya / banyak menyerap tenaga kerja.

Data menunjukkan bahwa selama periode tahun 1997-2001 jumlah usaha dari semua skala mengalami peningkatan secara parsial. Berdasarkan dari tabel 1 ternyata jumlah usaha kecil (UK) dan menengah menunjukkan jumlah yang besar, sehingga dapat dikatakan sektor usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan kunci pengamanan masalah ketenagakerjaan di Indonesia.

Dari tabel 2 terlihat bahwa jumlah unit UKM bervariasi menurut sektor ekonomi, dan terutama usaha kecil terkonsentrasi dipertanian, peternakan, kehutanan, kerajinan. Secara lebih kongkrit jumlah unit dan tenaga kerja disektor UKM menunjukkan jumlah yang besar.

Selanjutnya dari segi pendiriannya, sektor UKM tidak memerlukan suatu prosedur dan birokrasi yang terlalu rumit seperti perusahaan besar. Hanya berbekal ketekunan, keahlian dan pengalaman pribadi, tidak perlu modal yang besar, maka sektor ini sudah bisa jalan. Apalagi kalau ditunjang dengan skill yang tinggi, manajemen yang bagus, serta sarana promosi dan pemasaran yang tangguh, maka sektor ini akan semakin menjajikan keuntungan yang besar.

Dengan kenyataan diatas, maka seandainya disetiap tingkat RW ada satu atau dua UKM, maka akan menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Kondisi yang demikian harus kita upayakan mengingat sektor formal tampaknya sudah tidak mampu / semakin susah dalam penciptaan lapangan kerja baru.

## **KESIMPULAN**

Pembangunan dan pemberdayaan ekonomi rakyat khususnya sektor UKM harus menjadi komitmen nasional demi masa depan bangsa. Peran sektor UKM di era reformasi cukup mempunyai posisi yang strategis. Selain sebagai sektor yang paling tahan dilanda krisis juga mampu menyediakan lapangan kerja yang cukup besar diluar sektor formal. Keberadaan sektor ini yang tidak terikat pada rumitnya sistem birokrasi memungkinkan bagi siapa saja untuk berusaha disektor ini. Apalagi kalau ditunjang dengan berbagai keahlian dan ketrampilan khusus, maka sektor UKM akan sangat menjajikan keuntungan yang besar, lebih-lebih bila ditunjang dengan sarana dan prasarana yang canggih.

Selanjutnya dari data yang ada, bahwa perkembangan sektor UKM dari tahun ke tahun menunjukkan tren adanya kenaikan baik dari jenis usaha yang ditekuni maupun kualitas usahanya. Dengan kondisi ini bila dikembangkan diseluruh lapisan masyarakat kita, maka tidak ada lagi masyarakat kita yang tidak bekerja, kecuali bagi mereka yang sejak awal memang dasarnya pemalas. Paradigma yang kurang bagus ini tampaknya harus dihapus dan tidak sesuai lagi dengan kehidupan modern dengan prinsip *time is money*.

**DAFTAR RUJUKAN**

- Faisal, B. 2002, *Perekonomian Indonesia : Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia*, Jakarta : Erlangga.
- Krisnamurti, B. 2003. *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah : Ekonomi Rakyat Dengan Cara Berekonomi Mereka Sendiri*, Makalah disajikan dalam Kongres ISEI ke. XV, Malang, 13-15 Juli.
- Sutrisno, N. 2003. *Kewirausahaan dalam Pengembangan UKM di Indonesia*, Makalah disajikan dalam Kongres ISEI ke. XV.
- Tulus, T 2003, *Prospek UKM Indonesia di Dalam Era Perdagangan Bebas dan Globalisasi Ekonomi Dunia*, Makalah disajikan dalam Kongres ISEI ke. XV, Malang, 13-15 Juli.
- , 2002. *Warta Koperasi*, Media Perkoperasian dan UKM, Edisi 119, th XXII bulan Mei.
- , 2002, *Warta Koperasi*, Media Perkoperasian dan Wira Usaha, Edisi 126, th XXII, bulan Desember.